



L K P J

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN 2020



DINAS SOSIAL
KABUPATEN BULELENG



<http://dinsos.bulelengkab.go.id>



dinsos@bulelengkab.go.id



(0362) 21248



13. URUSAN SOSIAL

Pembangunan dibidang Kesejahteraan Sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan secara menyeluruh yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menangani pesatnya perkembangan masalah kesejahteraan sosial mendorong paradigma yang mengedepankan peran pemerintah daerah serta masyarakat luas sebagai potensi yang perlu diperhitungkan.

Untuk itulah penyelenggaraan Urusan Sosial mengarahkan dan memformulasikan pelaksanaan masalah kesejahteraan sosial sebagai konsekuensi tugas, pokok dan fungsi di bidang kesejahteraan sosial. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hal ini akan dapat dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan penanganan masalah baik yang bersifat prioritas/utama maupun penunjang.

Tujuan yang akan dicapai dalam penyelenggaraan urusan sosial sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022 dan RKPD Tahun 2020 yaitu:

- (a) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang terpadu, baik intern maupun ekstern lembaga;
- (b) Mengetahui secara dini dan munculnya kerawanan sosial;
- (c) Mencegah terhadap munculnya kerawanan sosial;
- (d) Mengidentifikasi dan menginventarisasi kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
- (e) Pemetaan lokasi kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
- (f) Meningkatkan aksesibilitas dan pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- (g) Meningkatkan aksesibilitas dan pemberdayaan bagi karang taruna dan pekerja sosial;
- (h) Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan

Sedangkan Sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam RKPD tahun 2020, yaitu dalam rangka mewujudkan Tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- (a) Meningkatnya koordinasi dan kerjasama yang semakin mantap dalam penanggulangan masalah sosial;
- (b) Diketuainya/terdeteksinya secara dini terhadap munculnya kerawanan sosial;
- (c) Dapat dicegahnya terhadap munculnya kerawanan sosial;



- (d) Teridentifikasinya dan terinventarisasinya kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
- (e) Terpetakannya lokasi dan jenis kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
- (f) Meningkatnya aksesibilitas dan pemberdayaan bagi penyandang masalah.

Indikator kinerja sasaran (*outcome*) merupakan tanda/bukti terwujudnya sasaran dan tujuan. Pencapaian indikator kinerja sasaran (*outcome*) Urusan Sosial dalam tahun 2020 berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tahun 2017-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV. 13
Indikator Kinerja Sasaran (*outcome*) Urusan Sosial Tahun 2020

No	Indikator Kinerja (<i>outcome</i>)	Satuan	S.d. Akhir RPJMD (Tahun 2022)	s.d Tahun 2019	Tahun 2020			S.d Tahun 2020
			Target	Capaian	Target	Capaian	%	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya							
	a. Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping Sosial	Desa / Kelurahan	148	148	148	148	100%	148
	b. Meningkatnya jumlah Fakir Miskin yang terampil dalam mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif melalui KUBE	Orang	500	200	100	60	60%	260
	c. Meningkatnya jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang terampil dalam mengembangkan UEP	Orang	200	80	40	40	100%	120
	d. Terverifikasinya data penduduk miskin dan PMKS	Desa/ Kelurahan	148	148	-	-	-	148
2	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial							
	a. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi perempuan dan anak	Orang	2.400	400	550	0	0	400
	b. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang PMKS	Orang	4.250	1.250	1.000	0	0	1.250
	c. Meningkatnya keterampilan anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak	Orang	40	40	-	-	-	40



	nakal							
	d. Meningkatnya harapan hidup lanjut usia	Orang	4.200	1.765	820	320	39,02%	2.085
	e. Meningkatnya keterampilan anak terlantar, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas dan anak nakal	Orang	60	-	20	0	0	0
3	Program Pembinaan Anak Terlantar							
	a. Meningkatnya keterampilan, terpenuhinya bantuan sembako bagi anak terlantar	Anak	3.840	1.425	800	135	16,87%	1.560
	b. Tersedianya data dan analisis permasalahan anak terlantar	Dokumen	4	1	1	0	0	1
4	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma							
	a. Meningkatnya kemandirian penyandang cacat dan eks trauma	Orang	50	50	-	-	-	50
	b. Meningkatnya peran penyandang cacat dan eks trauma	Orang / Perda	591 / 1	561 / 1	-	-	-	561 / 1
5	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo							
	a. Tersedianya penghuni Panti yang mendapat pelatihan	Panti Asuhan	17 Panti Asuhan	17	17	0	0	17
	b. Meningkatnya kualitas tenaga pengelola / pendidik panti dalam bidang pengelolaan, meningkatnya keterampilan anak asuh	Panti Asuhan	18	18	18	0	0	18
	c. Meningkatnya kesejahteraan penghuni Panti Asuhan	Panti Asuhan	9	9	9	4	44,44%	9
6	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya)							
	a. Meningkatnya keterampilan eks napi	Orang	150	40	30	0	0	40
	b. Meningkatnya keberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Orang	730	280	150	135	90%	415
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial							



	a. Meningkatnya pemahaman tentang PMKS dan PSKS, UGB, PUB Meningkatnya pemahaman kesejahteraan keluarga	Orang	1.250	500	250	0	0	500
	b. Meningkatnya jejaring kerjasama dengan Suka Duka di bidang usaha kesejahteraan sosial	Karang Taruna	10	4	2	0	0	4
	c. Meningkatnya SDM Karang Taruna, PSM dan TKSK di bidang usaha dan Kesejahteraan Sosial	Karang Taruna, PSM dan TKSK	45, 45 dan 9	18, 18 dan 9	9, 9 dan 9	0,0 dan 0	0	18, 18 dan 9
	d. Meningkatnya perlindungan kesosialan	Lembaga / Orang	2 / 18	2 / 18	-	-	-	2 / 18
8	Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan Dan Kesetiakawanan Sosial							
	a. Meningkatnya pemahaman kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Orang / Kegiatan	400 / 5	400 / 6	400 / 5	400/2	70%	400 / 6
	b. Meningkatnya fungsi TMP Qurastana dan Monumen Tugu Perjuangan	Monumen	5	5	5	5	100%	5
	c. Meningkatnya fungsi monument	Monumen / Tugu Perjuangan	5	5	5	5	100%	5
9	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							
	a. Meningkatnya kewaspadaan terhadap masalah-masalah strategis dan tertanganinya masalah strategis tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	KK / Orang	2.750 / 36	1.525 / 6	500 / 10	2.375 / 4	257,5 %	3.900 / 10
	b. Terverifikasinya data penduduk miskin dan PMKS	Desa / Kelurahan	148	148	148	148	100%	148
	c. Meningkatnya perlindungan kesosialan	Lembaga	1	1	1	1	100%	1
10	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma							
	a. Meningkatnya kemandirian penyandang disabilitas dan eks trauma	Orang	200	50	50	0	0	50
	b. Meningkatnya peran penyandang disabilitas dan eks trauma	Orang	2.120	645	530	288	54,34%	933
	Rata-Rata						49,28%	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 2020.



Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terhadap capaian target indikator kinerja pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yaitu pada indikator Meningkatnya jumlah Fakir Miskin yang terampil dalam mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif melalui KUBE, capaian target fisiknya sebesar 60%, karena adanya bencana non alam (Pandemi Covid-19) sehingga anggaran di alihkan untuk menangani bencana tersebut, ini mengakibatkan terjadinya penurunan target menjadi 60 orang (6 KUBE).
2. Terhadap capaian target indikator kinerja pada Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yaitu pada indikator meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi perempuan dan anak, indikator meningkatnya pemahaman masyarakat tentang PMKS, serta indikator meningkatnya keterampilan anak terlantar, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas dan anak nakal, ketiga indikator tersebut capaian kinerjanya 0% karena target kinerjanya di nol-kan, indikator Meningkatnya harapan hidup lanjut usia, capaian kinerjanya 39,02% karena hanya bisa menysasar 320 orang, ini disebabkan adanya bencana non alam (Pandemi Covid-19) sehingga anggaran di alihkan untuk menangani bencana tersebut.
3. Terhadap capaian target indikator kinerja pada Program Pembinaan Anak Terlantar yaitu pada indikator meningkatnya keterampilan, terpenuhinya bantuan sembako bagi anak terlantar, capaian kinerjanya 16,87% karena hanya bisa menysasar 135 orang dan indikator tersedianya data dan analisis permasalahan anak terlantar, capaian kinerjanya 0% karena target kinerjanya di nol-kan, ini disebabkan adanya bencana non alam (Pandemi Covid-19) sehingga anggaran di alihkan untuk menangani bencana tersebut.
4. Terhadap capaian target indikator kinerja pada Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo yaitu pada indikator tersedianya penghuni Panti yang mendapat pelatihan dan indikator Meningkatnya kualitas tenaga pengelola / pendidik panti dalam bidang pengelolaan, meningkatnya keterampilan anak asuh, capaian kinerjanya 0% karena target kinerjanya di nol-kan, sedangkan indikator meningkatnya kesejahteraan penghuni Panti Asuhan, capaian kinerjanya 44,44% karena hanya bisa menysasar 4 Panti Asuhan, ini disebabkan adanya bencana non alam (Pandemi Covid-19) sehingga anggaran di alihkan untuk menangani bencana tersebut.
5. Terhadap capaian target indikator kinerja pada Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya) yaitu pada indikator meningkatnya keterampilan eks napi capaian kinerjanya 0% karena target kinerjanya di nol-kan, sedangkan indikator meningkatnya keberdayaan eks penyandang penyakit sosial, capaian kinerjanya



- 90% karena hanya bisa menysasar 135 orang, ini disebabkan adanya bencana non alam (Pandemi Covid-19) sehingga anggaran di alihkan untuk menangani bencana tersebut.
6. Terhadap capaian target indikator kinerja pada Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yaitu pada indikator Meningkatnya pemahaman tentang PMKS dan PSKS, UGB, PUB meningkatnya pemahaman kesejahteraan keluarga, indikator Meningkatnya jejaring kerjasama dengan Suka Duka di bidang usaha kesejahteraan sosial, serta indikator meningkatnya SDM Karang Taruna, PSM dan TKSK di bidang usaha dan Kesejahteraan Sosial, ketiga indikator tersebut capaian kinerjanya 0%, karena target kinerjanya di nol-kan, ini disebabkan adanya bencana non alam (Pandemi Covid-19) sehingga anggaran di alihkan untuk menangani bencana tersebut.
 7. Terhadap capaian target indikator kinerja pada Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan Dan Kesetiakawanan Sosial yaitu pada indikator meningkatnya pemahaman kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, capaian kinerjanya 70% karena hanya bisa melaksanakan dua kegiatan yang bisa dijalankan yaitu HUT Monumen Bhuana Kerta dan Hari Pahlawan, ini disebabkan adanya bencana non alam (Pandemi Covid-19) sehingga anggaran di alihkan untuk menangani bencana tersebut.
 8. Terhadap capaian target indikator kinerja pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu pada indikator meningkatnya kewaspadaan terhadap masalah-masalah strategis dan tertanganinya masalah strategis tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, capaian kinerjanya 257,5% hal ini di sebabkan karena banyaknya usulan dari desa untuk permohonan bantuan sembako akibat dari dampak bencana non alam (Pandemi Covid-19).
 9. Terhadap capaian target indikator kinerja pada Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma yaitu pada indikator Meningkatnya kemandirian penyandang disabilitas dan eks trauma, capaian kinerjanya 0%, karena target kinerjanya di nol-kan, sedangkan indikator meningkatnya peran penyandang disabilitas dan eks trauma, capaian kinerjanya 54,34% karena hanya bisa menysasar 288 orang, ini disebabkan adanya bencana non alam (Pandemi Covid-19) sehingga anggaran di alihkan untuk menangani bencana tersebut.

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa kinerja *outcome* Urusan Sosial tidak dapat dipenuhi sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 pada tahun 2020, dengan rata rata sebesar 49,28 %. ini disebabkan adanya bencana non alam (Pandemi Covid-19) sehingga anggaran di alihkan untuk menangani bencana tersebut.



Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng pada Tahun 2020, tercantum pada tabel sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Kota		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Indikator : Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti	2020	100	78,26	78,26
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti Indikator : Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti	2020	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di luar panti	2020	100	100	100



		Indikator : Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti				
4.	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti	Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis di luar panti Indikator : Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti	2020	100	100	100
5.	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana dan sosial daerah Kabupaten/Kota. Indikator : Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	2020	100	100	100

Dari tabel di atas nilai rata - rata capaian SPM bidang urusan sosial Kabupaten Buleleng tahun 2020 adalah 95,65%, ini dikarenakan dari 5 (lima) jenis pelayanan SPM urusan sosial, 4 (empat) jenis pelayanan tercapai 100% dan 1 (satu) jenis pelayanan



SPM baru tercapai 78,26%. Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM yaitu tenaga PNS sebanyak 27 orang, dan non PNS sebanyak 104 orang. Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian SPM bidang urusan sosial ini berasal dari sumber dana APBD dan APBN.

Berdasarkan pengukuran SKM di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) : 82,42, maka kinerja pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berada dalam mutu pelayanan Baik dengan kategori B. Angka tersebut di peroleh dari 200 orang sample responden yang terdiri dari 102 orang berjenis kelamin laki laki dan 98 orang perempuan, dengan jenis pendidikan SD 58 orang, SMP 76 orang, SMA 62 Orang, S1 sejumlah 3 orang, dan S3 sejumlah 1 orang. Jumlah unsur pelayanan sebanyak 9. Hal ini terjadi berkat adanya dukungan alokasi dana dari APBD Kabupaten Buleleng.

a. Program dan Kegiatan

Semua sasaran yang ingin dicapai dalam program tersebut diatas dijabarkan dalam 9 Program Utama/Wajib dengan 22 kegiatan dan 6 Program Penunjang dengan 23 kegiatan penunjang lainnya. Untuk membiayai semua program tersebut baik 9 Program Utama/Wajib dengan 22 kegiatan dan 6 Program Penunjang dengan 23 kegiatan di anggaran pada Belanja Langsung dari APBD Kabupaten tahun 2020 sebesar Rp.4.121.995.000,00 yang dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai Rp.84.867.000,00 belanja barang dan jasa Rp.4.015.828.000,00 serta belanja modal Rp.21.300.000,00 Realisasi belanja langsung sebesar Rp. 4.103.950.774,00 atau 99,56% sedangkan untuk Program Utama dianggarkan sebesar Rp. 2.741.735.050,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.730.261.928,00 atau 99,58%, dengan rata-rata pencapaian fisiknya (*output*) 99,97%.

Adapun program kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Sosial Tahun 2020 meliputi:

TABEL. PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG / KEG	INDIKATOR (OUTCOME / OUTPUT)	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
						Rp.	Kinerja	Rp. (%)	Kinerja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	SOSIAL	DINAS SOSIAL		A. PROGRAM UTAMA									
				1. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Rp 382.252.200	14,5%	Rp 381.422.110 (99,78 %)		1. Adanya bencana non alam (Pandemi Covid-19) sehingga anggaran di alihkan untuk menangani bencana tersebut.	1. Bekerjasama dengan Komunitas Sosial, CSR dan pihak ke tiga dalam pemberian bantuan kepada PMKS		
				1.1. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Jumlah petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin serta bantuan sembako kepada PMKS	Rp 184.353.000	148 Desa/ Kelurahan, 500 Orang	Rp 183.776.450 (99,68 %)	148 Desa/ Kelurahan, 500 Orang (100%)				
				1.2. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Fakir Miskin yang mendapat bantuan UEP	Rp 133.839.200	6 KUBE	Rp 133.670.660 (99,87 %)	6 KUBE (100%)				
				1.3. Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapat bantuan UEP	Rp 64.060.000	4 KUBE	Rp 63.975.000 (99,86 %)	4 KUBE (100%)				
				2. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	Rp 190.329.700	15,4%	Rp 189.507.050 (99,56 %)					
				2.1. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak	Rp 525.000	0 Orang	Rp 522.000 (99,42 %)	0 Orang				
				2.2. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah KIE Konseling dan kampanye sosial bagi PMKS	Rp 828.400	0 Orang	Rp 792.550 (95,67 %)	0 Orang				
				2.3. Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti	Jumlah lanjut usia di luar panti yang mendapat pembinaan dan bimbingan	Rp 147.773.300	320 Orang	Rp 147.019.450 (99,48 %)	320 Orang (100%)				
				2.4. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak nakal	Jumlah anak nakal yang mendapat pelatihan dan keterampilan dan praktek belajar kerja	Rp 41.203.000	0 Anak	Rp 41.173.050 (99,92 %)	0 Anak				
				3. PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	Persentase anak terlantar yang mendapat penanganan	Rp 96.064.900	35,2%	Rp 95.678.650 (99,59 %)					

				3.1. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapat pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja	Rp 96.064.900	135 Anak	Rp 95.678.650 (99,59 %)	135 Anak (100%)			
				4. PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO	Jumlah Panti Asuhan yang mendapat pembinaan	Rp 61.348.100	24,3%	Rp 61.249.050 (99,83 %)				
				4.1. Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Penghuni Panti Asuhan/Jompo	Jumlah Panti Asuhan yang mendapat bantuan	Rp 61.348.100	4 Panti Asuhan	Rp 61.249.050 (99,83 %)	4 Panti Asuhan (100%)			
				5. PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani	Rp 114.728.200	19,5%	Rp 114.041.150 (99,40 %)				
				5.1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks napi yang mendapat pelatihan keterampilan	Rp 22.695.400	0 Orang	Rp 22.638.700 (99,75 %)	0 Orang			
				5.2. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Rp 92.032.800	135 Orang	Rp 91.402.450 (99,31 %)	135 Orang (100%)			
				6. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif dalam pemberdayaan kelembagaan sosial	Rp 96.271.000	5,3%	Rp 96.200.100 (99,92 %)				
				6.1. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Rp 46.029.800	0 Orang	Rp 46.012.950 (99,96 %)	0 Orang			
				6.2. Peningkatan Jejaring Kerja Sama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah jejaring kerjasama pelaku pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Rp 3.680.700	0 Karang Taruna	Rp 3.651.500 (99,20 %)	0 Karang Taruna			
				6.3. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Rp 46.560.500	0 Karang Taruna ,0 PSM dan 0 TKSK	Rp 46.535.650 (99,94 %)	0 Karang Taruna ,0 PSM dan 0 TKSK			
				7. PROGRAM PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	Persentase peningkatan pelestarian TMP/Monumen dan nilai kepahlawanan	Rp 932.310.950	18%	Rp 929.454.248 (99,69 %)				
				7.1. Penanaman Nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah pemahaman tentang nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Rp 158.124.750	3 Kegiatan	Rp 155.894.860 (98,58 %)	3 Kegiatan (100%)			
				7.2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan	Jumlah taman makam pahlawan dan monument tugu perjuangan	Rp 75.116.600	1 TMP, 5 Monumen	Rp 75.093.870 (99,96 %)	1 TMP, 5 Monumen (100%)			
				7.3. Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	Jumlah UPT monument dan tugu perjuangan	Rp 699.069.600	5 Monumen/Tugu Perjuangan	Rp 698.465.518 (99,91 %)	5 Monumen/Tugu Perjuangan (100%)			

				8. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Rp 645.904.000	84%	Rp 641.221.070 (99,27 %)				
				8.1. Penanganan Masalah - Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Jumlah penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Rp 341.717.000	2.375 KK dan 6 Orang	Rp 337.306.190 (98,70 %)	2.375 KK dan 4 Orang (98,71%)			
				8.2. Pemutahiran data penduduk miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya	Jumlah pemutahiran data penduduk miskin	Rp 99.223.400	148 Desa/ Kelurahan	Rp 99.158.600 (99,93 %)	148 Desa/ Kelurahan (100%)			
				8.3. Pengembangan model kelembagaan perlindungan jaminan sosial	Jumlah model kelembagaan perlindungan jaminan sosial	Rp 204.963.600	1 Lembaga	Rp 204.756.280 (99,89 %)	1 Lembaga (100%)			
				9. PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG DISABILITAS DAN TRAUMA	Persentase penyandang disabilitas dan eks trauma yang tertangani	Rp 222.526.000	9,6%	Rp 221.488.500 (99,53 %)				
				9.1. Pendidikan dan pelatihan bagi para Penyandang Disabilitas dan eks Trauma	Jumlah pelatihan bagi para penyandang disabilitas	Rp 30.316.000	0 Orang	Rp 30.183.500 (99,56 %)	0 Orang			
				9.2. Pendayagunaan para Penyandang Disabilitas dan eks Trauma	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma	Rp 192.210.000	288 Orang	Rp 191.305.000 (99,52 %)	288 Orang (100%)			
				JUMLAH (A)		Rp 2.741.735.050		Rp 2.730.261.928 (99,58 %)				
				B. PROGRAM PENUNJANG								
				1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Rp 1.023.350.600	100%	Rp 1.017.843.453 (99,46 %)				
				1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar	Rp 43.784.400	2.000 Eksemplar	Rp 43.776.655 (99,98 %)	2.000 Eksemplar (100%)			
				1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, telpon dan listrik	Rp 160.902.000	132 Rekening	Rp 158.184.914 (98,31 %)	132 Rekening (100%)			
				1.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kendaraan	Rp 212.240.000	2 Unit	Rp 211.916.850 (99,84 %)	2 Unit (100%)			
				1.4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	Rp 8.000.000	33 Unit	Rp 6.061.500 (75,76 %)	33 Unit (100%)			
				1.5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan	Rp 166.192.200	12 Laporan	Rp 166.187.865 (99,99 %)	12 Laporan (100%)			

				1.6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan, jumlah tenaga kebersihan	Rp 157.434.000	28 Unit, 7 Orang	Rp 157.389.890 (99,97 %)	28 Unit, 7 Orang (100%)			
				1.7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	Rp 19.364.700	52 Unit	Rp 19.341.135 (99,87 %)	52 Unit (100%)			
				1.8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Rp 14.667.500	12 Unit	Rp 14.532.474 (99,07 %)	12 Unit (100%)			
				1.9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Rp 8.308.000	12 Unit	Rp 8.304.340 (99,95 %)	12 Unit (100%)			
				1.10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 6.600.000	12 Unit	Rp 6.600.000 (100 %)	12 Unit (100%)			
				1.11. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	Rp 13.168.000	12 Unit	Rp 13.166.010 (99,98 %)	12 Unit (100%)			
				1.12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/dalam daerah	Rp 57.878.800	12 Laporan	Rp 57.591.300 (99,50 %)	12 Laporan (100%)			
				1.13. Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	Rp 154.811.000	12 Laporan	Rp 154.790.520 (99,98 %)	12 Laporan (100%)			
				2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	Rp 197.550.450	100%	Rp 196.926.475 (99,68 %)				
				2.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Rp 8.500.000	2 Unit	Rp 8.470.000 (99,64 %)	2 Unit (100%)			
				2.2. Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah terselenggaranya upacara keagamaan	Rp 39.195.000	21 Unit	Rp 39.169.625 (99,93 %)	21 Unit (100%)			
				2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor	Rp 53.255.450	1 Tahun	Rp 53.000.000 (99,52 %)	1 Tahun (100%)			
				2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	Rp 45.350.000	13 Unit	Rp 45.153.350 (99,56 %)	13 Unit (100%)			
				2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Rp 25.000.000	29 Unit	Rp 24.981.000 (99,92 %)	29 Unit (100%)			
				2.6. Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah	Jumlah kegiatan lomba	Rp 26.250.000	6 Unit	Rp 26.152.500 (99,62 %)	6 Unit (100%)			
				3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat Daerah		100%					
				3.1. Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah penganyar	-	-	-	-			

				4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase serapan anggaran sesuai target	Rp 52.741.000	100%	Rp 52.588.328 (99,71 %)				
				4.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Sosial	Rp 52.741.000	7 Jenis Laporan	Rp 52.588.328 (99,71 %)	7 Jenis Laporan (100%)			
				5. PROGRAM PERENCANAAN ANGGARAN SKPD	Persentase perencanaan anggaran SKPD yang sesuai Renstra	Rp 106.617.900	100%	Rp 106.330.590 (99,73 %)				
				5.1. Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen anggaran	Rp 106.617.900	8 Jenis Dokumen	Rp 106.330.590 (99,73 %)	8 Jenis Dokumen (100%)			
				6. PROGRAM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pelaksanaan pameran pembangunan	-	100%	-	-			
				6.1. Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Jumlah pameran pembangunan dilaksanakan	-	-	-	-			
				JUMLAH (B)		Rp 1.380.259.950		Rp 1.373.688.846 (99,52 %)				
				JUMLAH (A + B)		Rp 4.121.995.000		Rp 4.103.950.774 (99,56 %)				



b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020 dalam rangka mewujudkan Sasaran dan Tujuan sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2020 adalah :

- 1). Jumlah penduduk yang banyak dengan tingkat kemiskinan yang juga cukup banyak dengan sebaran yang begitu luas merupakan tantangan dalam upaya penanggulangan/pengentasannya.
- 2) Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan utamanya peningkatan akibat migrasi dari Luar Bali tidak dapat dipungkiri akan memunculkan kerawanan sosial.
- 3). Belum dimilikinya rumah singgah yang dipergunakan untuk menampung, memberikan layanan advokasi, perlindungan dan proteksi sosial bagi para tuna sosial (WTS, Gepeng dan orang terlantar luar daerah), korban tindak kekerasan maupun masalah sosial lainnya.
- 4). Mengingat banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih tersebar di seluruh Desa/ Kelurahan yang belum dapat tertangani sedangkan dana yang tersedia sangat terbatas, maka dari tahun ke tahun sangat dibutuhkan anggaran yang cukup guna menangani permasalahan tersebut diatas secara berkelanjutan.
- 5). Adanya bencana non alam (Pandemi Covid-19) sehingga anggaran di alihkan untuk menangani bencana tersebut.

Sedangkan solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu :

- 1) Melakukan rekapitulasi terhadap identifikasi permasalahan sosial (*assesment*) yang selanjutnya dijadikan bahan dalam penyajiannya dan juga dalam usulan penganggaran daerah dan pusat (Kementerian/Lembaga)
- 2) Mengadakan koordinasi yang baik dengan instansi terkait guna memperlancar tugas-tugas di bidang Kesejahteraan Sosial dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bagian di Sekretariat Daerah, Kantor Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian, Kementerian Agama, PMI, Kepolisian, Kodim, Dunia Usaha (*Cooperate Social Responcibility*), Pemuda Panca Marga (P2M), Pramuka dan lain-lain dalam rangka penanganan masalah Tuna Sosial, Penanggulangan Bencana dan penanggulangan kemiskinan.



- 3) Bekerjasama dengan Komunitas Sosial, CSR dan pihak ke tiga dalam pemberian bantuan kepada PMKS

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng,



PUTU KARIAMAN PUTRA, S.Sos, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053